

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan untuk mengetahui bagaimana media relations dalam meningkatkan citra Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, maka dapat penulis bahwa ProKomPim sudah mengimplementasikan keenam hubungan media oleh Jefkins secara konsisten namun media relations di dalamnya secara substansial menghadapi keterbatasan dalam mewujudkan transparansi keseluruhan, independensi media, dan akuntabilitas pemerintah. Implementasi dari melayani dan memahami media tidak lepas dari komunikasi terstruktur yang rutin dilakukan lewat media gathering, press release, dan workshop secara berkala. Semua komunikasi lebih cenderung menggunakan pendekatan yang informal yang masih dapat dibatasi antara batasan personal dan profesional. Kredibilitas humas dalam menerapkan prinsip membangun reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya juga dinilai baik karena komunikasi tersebut dilakukan cukup intens dengan ralat untuk kesalahan teknis saja.

Kemudian ketika berbicara mengenai kualitas rilis dalam prinsip menyediakan salinan yang baik, ada penilaian tertentu dari media di mana entah itu tulisan ataupun visual diberikan oleh humas dengan kualitas yang baik meskipun hambatannya ada pada angle foto yang cenderung bersifat protokoler. Akan tetapi, adanya evolusi dari ProKomPim untuk bekerja lebih baik lagi membuat kualitas salinan selalu dinamis ke arah yang positif. Yang mana memberikan dampak ketergantungan dari media untuk menerima salinan tersebut dengan verifikasi yang minimal. Antara media dan humas juga memiliki dinamika kerja sama yang begitu erat melalui berbagai bentuk kegiatan media relations yang sudah disebutkan, dinamika kerjasama tersebut tidak lepas dari keduanya saling membantu satu sama lain. Dalam bekerja sama dalam menyediakan materi juga, ProKomPim dan media terikat dalam suatu model advertorial yang mana menjadi faktor pendukung namun memberikan dilema tertentu di dalamnya yang berpotensi dapat mengurangi independensi jurnalistik.

Dalam menyediakan fasilitas verifikasi, di sini ada keterbatasan tertentu yang mana terdapat komparasi dari kedua humas Pemerintah Kabupaten Subang, yang mana ProKomPim melakukan verifikasi dengan pendekatan informal via WhatsApp yang eksklusif dan dinilai cepat, sedangkan Diskominfo dengan formal melalui website PPID yang terbuka dan terstruktur namun dinilai kurang sebagai sumber. Verifikasi dalam hal

narasumber, ProKomPim maupun Diskominfo tidak memiliki database yang resmi sehingga media harus proaktif dalam berkomunikasi dengan OPD terkait. Lalu, dalam membangun hubungan personal yang kokoh dinilai erat terutama berbicara mengenai hubungan antara ProKomPim dan media yang memiliki intensitas tinggi, hal tersebut memberikan kepercayaan dan pemahaman yang kuat di antara keduanya, namun tentu tidak lepas dari catatan kritis mengenai objektivitas dan independensi media.

Dalam hasilnya ada beberapa citra dan kondusivitas yang berhasil dibangun dalam pengimplementasian tersebut. Yang mana hal itu tidak lepas dari cara Bupati Kabupaten Subang dengan kepemimpinan masa kini dengan mengubah komunikasi pemerintahan yang kaku menjadi lebih modern dan melek digital, ditambah dengan mengadopsi gaya komunikasi informal dengan sekat yang tipis. Namun, analisis terhadap kasus yang spesifik mengungkap dinamika yang lebih kompleks, di mana di sini menunjukkan bahwa meskipun ProKomPim menunjukkan adanya kecepatan respon dan konsistensi komunikasi yang baik tapi terdapat transparansi selektif dalam menghadapi isu kontroversial. Yang mana mengakibatkan hal yang dapat memperkeruh kredibilitas ProKomPim dengan adanya analisis terhadap kasus-kasus spesifik tersebut melihat adanya kompleksitas yang tidak tertangkap oleh kerangka normatif Jefkins semata. Penelitian ini menemukan beberapa kekhawatiran yang menunjukkan bahwa implementasi yang baik secara teknis tidak otomatis menghasilkan ekosistem komunikasi publik yang sehat dan demokratis.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran membangun yang dapat diadopsi sebagai bahan rujukan untuk humas pemerintah daerah yang bersangkutan maupun lainnya, media, dan juga penelitian selanjutnya. Pertama-tama, saran yang ditujukan untuk humas pemerintah meliputi berbagai hal meliputi hal-hal sebagai beriku.

- a) Tansparansi substansif yang diharapkan dapat dikembangkan dengan protokol yang lebih jelas agar informasi strategis seperti misalnya kebijakan kontroversial dapat disampaikan secara proaktif dan tidak reaktif ketika ditanya oleh media. Penyampaian informasi tersebut harus ditetapkan dengan garis waktu yang cukup solid agar memastikan media dapat diberikan informasi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.

- b) Adanya penetapan pembagian fungsi yang jelas dan tertulis, dari sisi SOP masing-masing maupun tugas pokok dan fungsi dari kedua instansi, di sini penulis menemukan adanya tumpang tindih antara ProKomPim dan Diskominfo yang mana dapat menimbulkan inefisiensi dan kebingungan pada pihak media. Pembagian ini meliputi kanal komunikasi yang memadai dengan berbagai jenis informasi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Meskipun ada pembagian fungsi, penulis berharap adanya koordinasi yang erat agar tidak terjadi gap informasi dan inkonsistensi pesan dengan mengembangkan koordinasi rutin, database yang bisa diakses kedua institusi, mengeluarkan statement bersama agar tidak ada perbedaan narasi, dan adanya mutual backup. Temuan juga mengatakan bahwa kurangnya peran Diskominfo yang menunjukkan adanya potensi dapat dimanfaatkan seperti meningkatkan kualitas PPID dan menjadikan Diskominfo sebagai data center yang substansif.
- c) Mengembangkan survei kepuasan media secara berkala dan mengukur efektivitas media relations yang didapatkan dari keragaman angle berita dan tingkat keseimbangan, dan bukan hanya berdasarkan jumlah publikasi.
- d) Mendorong kreativitas konten yang seimbang dengan melanjutkan inovasi yang sudah berjalan dengan baik. Diikuti dengan mengembangkan angle foto yang lebih dinamis agar menghindari dominasi angle yang formal dengan melatih tim untuk menangkap format foto yang lebih bersifat humas interest

Selanjutnya, beberapa saran juga ditujukan untuk pihak-pihak media yang bermitra dengan instansi pemerintahan sebagai berikut.

- a) Menjaga independensi dan objektivitas dengan terus melakukan verifikasi independen meski rilis dinilai memiliki kualitas yang tinggi. Kendati memiliki hubungan personal dengan humas terkait, diharapkan media dapat menjaga batasan profesional agar informasi tetap objektif dengan terus mengembangkan berita investigatif.
- b) Media diharapkan dapat meningkatkan pencarian narasumber alternatif seperti akademisi, masyarakat, dan lainnya yang kemudian angle berita dikembangkan secara diversif yang bukan hanya kegiatan seremonial saja.
- c) Jika advertorial tetap dilakukan, diharapkan adanya evaluasi ketergantungan finansial pada advertorial pemerintah dan memisahkan dengan jelas antara konten editorial dan advertorial. Pertimbangan advertorial diharapkan lebih berat dalam memutuskan pembuatan berita yang layak untuk dimuat.

- d) Media diharapkan mengingat fungsinya sebagai kontrol sosial, yang bukan hanya mempublikasikan informasi pemerintah tapi juga harus mengawasi dan tetap kritis terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah untuk publik agar menciptakan kondusivitas yang seimbang.

Terakhir, beberapa saran ditunjukkan agar dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya dengan sebagai berikut.

- a) Memperluas cakupan penelitian dengan melakukan penelitian komparatif dengan daerah lain agar dapat melihat apa saja evaluasi yang dapat dipelajari. Kemudian meneliti perspektif masyarakat sebagai konsumen berita dengan rumusan masalah yang relevan dengan melihat manfaat dari praktik media relations yang baik dan apakah informasi yang diterima cukup lengkap dan seimbang. Juga tidak lupa dengan meneliti dampak jangka panjang dari model advertorial terhadap independensi dan kualitas jurnalisme lokal.
- b) Meneliti aspek-aspek yang belum terungkap dalam penelitian ini yang mana di dalamnya mencakup dinamika politik lokal dalam mempengaruhi praktik media relations. Kemudian melihat tekanan politik yang dapat mempengaruhi keputusan editorial media. Terakhir, melihat kegiatan media relations ketika adanya transisi kepemimpinan.
- c) Mengembangkan kerangka teoritis seperti model media relations pada era digital yang lebih kontekstual dengan karakteristik pemerintahan lokal di Indonesia. Dari sana juga diharapkan penelitian selanjutnya dapat mencari tahu paradoks kondusivitas dan independensi secara lebih mendalam dengan kerangka teoritis yang lebih kompleks.